

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 38 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 23
TAHUN 2018 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 296 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah serta pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan terhadap tanah aset Pemerintah Kota Malang agar dapat dilaksanakan secara tertib dan bertanggung jawab, perlu menyesuaikan Peraturan Walikota Malang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Malang Nomor 23 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2016 tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas bawah Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 701);
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 511);
15. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 23 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2018 Nomor 23) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran I Huruf A angka 5 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
2. Ketentuan Lampiran III Huruf H di tambahkan 1 (satu) angka yaitu angka 17 dan Huruf I angka 7 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 31 Desember 2018

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

WASTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH, M.Hum
Pembina Tk. I

NIP. 19650302 199003 1 019

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2018 NOMOR 39

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA MALANG
 NOMOR : 38 TAHUN 2018
 TENTANG :
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 WALIKOTA MALANG NOMOR 23
 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR BIAYA
 UMUM TAHUN ANGGARAN 2019.

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS

A. PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

5. Biaya Transport Pegawai dengan tujuan Kota di luar Provinsi

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET (PP)	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
1	Ambon	Denpasar	8.054.000	4.471.000
2	Ambon	Jayapura	7.434.000	4.161.000
3	Ambon	Kendari	4.824.000	2.856.000
4	Ambon	Makassar	6.022.000	3.455.000
5	Ambon	Manokwari	5.177.000	3.027.000
6	Ambon	Palu	6.140.000	3.508.000
7	Ambon	Sorong	3.637.000	2.257.000
8	Ambon	Surabaya	8.803.000	4.845.000
9	Ambon	Ternate	4.022.000	2.449.000
10	Balikpapan	Banda Aceh	12.739.000	6.749.000
11	Balikpapan	Batam	10.354.000	5.305.000
12	Balikpapan	Denpasar	10.739.000	5.648.000
13	Balikpapan	Jayapura	19.071.000	10.086.000
14	Balikpapan	Jogyakarta	9.669.000	4.749.000
15	Balikpapan	Makassar	12.664.000	6.150.000
16	Balikpapan	Manado	15.702.000	7.295.000
17	Balikpapan	Medan	12.493.000	6.140.000
18	Balikpapan	Padang	10.942.000	5.369.000
19	Balikpapan	Palembang	9.445.000	4.749.000
20	Balikpapan	Pekanbaru	10.996.000	5.423.000
21	Balikpapan	Semarang	9.445.000	4.674.000
22	Balikpapan	Solo	9.445.000	4.813.000
23	Balikpapan	Surabaya	10.889.000	5.113.000
24	Balikpapan	Timika	18.408.000	9.445.000
25	Banda Aceh	Denpasar	10.835.000	6.279.000
26	Banda Aceh	Jayapura	19.167.000	10.717.000
27	Banda Aceh	Jogyakarta	9.765.000	5.380.000
28	Banda Aceh	Makassar	12.760.000	6.781.000
29	Banda Aceh	Manado	15.798.000	7.926.000
30	Banda Aceh	Pontianak	9.990.000	5.840.000
31	Banda Aceh	Semarang	9.530.000	5.305.000
32	Banda Aceh	Solo	9.530.000	5.444.000
33	Banda Aceh	Surabaya	10.985.000	5.744.000
34	Banda Aceh	Timika	18.504.000	10.076.000
35	Bandar Lampung	Balikpapan	8.129.000	4.129.000
36	Bandar Lampung	Banda Aceh	8.225.000	4.760.000

37	Bandar Lampung	Banjarmasin	6.193.000	3.412.000
38	Bandar Lampung	Batam	5.840.000	3.316.000
39	Bandar Lampung	Biak	14.119.000	7.487.000
40	Bandar Lampung	Denpasar	6.236.000	3.647.000
41	Bandar Lampung	Jayapura	14.568.000	8.097.000
42	Bandar Lampung	Jogyakarta	5.155.000	2.760.000
43	Bandar Lampung	Kendari	8.354.000	4.482.000
44	Bandar Lampung	Makassar	8.161.000	4.161.000
45	Bandar Lampung	Malang	5.594.000	3.134.000
46	Bandar Lampung	Manado	11.199.000	5.305.000
47	Bandar Lampung	Mataram	6.246.000	3.626.000
48	Bandar Lampung	Medan	7.979.000	4.150.000
49	Bandar Lampung	Padang	6.439.000	3.380.000
50	Bandar Lampung	Palangkaraya	5.947.000	3.401.000
51	Bandar Lampung	Palembang	4.931.000	2.760.000
52	Bandar Lampung	Pekanbaru	6.482.000	3.433.000
53	Bandar Lampung	Pontianak	5.380.000	3.220.000
54	Bandar Lampung	Semarang	4.931.000	2.685.000
55	Bandar Lampung	Solo	4.931.000	2.824.000
56	Bandar Lampung	Surabaya	6.386.000	3.123.000
57	Bandar Lampung	Timika	13.905.000	7.455.000
58	Bandung	Batam	6.289.000	3.583.000
59	Bandung	Denpasar	5.626.000	3.252.000
60	Bandung	Jakarta	2.064.000	1.476.000
61	Bandung	Jambi	5.006.000	2.941.000
62	Bandung	Jogyakarta	3.369.000	2.129.000
63	Bandung	Padang	6.129.000	3.508.000
64	Bandung	Palembang	4.385.000	2.631.000
65	Bandung	Pangkalpinang	4.599.000	2.738.000
66	Bandung	Pekanbaru	6.525.000	3.701.000
67	Bandung	Semarang	3.027.000	1.957.000
68	Bandung	Solo	3.647.000	2.268.000
69	Bandung	Surabaya	4.824.000	3.930.000
70	Bandung	Tanjung Pandan	4.439.000	2.663.000
71	Banjarmasin	Banda Aceh	10.792.000	6.022.000
72	Banjarmasin	Batam	8.407.000	4.578.000
73	Banjarmasin	Biak	16.686.000	8.749.000
74	Banjarmasin	Denpasar	8.792.000	4.920.000
75	Banjarmasin	Jayapura	17.135.000	9.359.000
76	Banjarmasin	Jogyakarta	7.723.000	4.022.000
77	Banjarmasin	Medan	10.546.000	5.412.000
78	Banjarmasin	Padang	9.006.000	4.642.000
79	Banjarmasin	Palembang	7.498.000	4.022.000
80	Banjarmasin	Pekanbaru	9.049.000	4.696.000
81	Banjarmasin	Semarang	7.498.000	3.958.000
82	Banjarmasin	Solo	7.498.000	4.097.000
83	Banjarmasin	Surabaya	8.942.000	4.385.000
84	Banjarmasin	Timika	16.472.000	8.717.000
85	Batam	Banda Aceh	10.439.000	5.936.000
86	Batam	Denpasar	8.450.000	4.824.000
87	Batam	Jayapura	16.782.000	9.263.000
88	Batam	Jogyakarta	7.370.000	3.936.000
89	Batam	Makassar	10.375.000	5.337.000
90	Batam	Manado	13.413.000	6.482.000
91	Batam	Medan	10.193.000	5.316.000

92	Batam	Padang	8.653.000	4.546.000
93	Batam	Palembang	7.145.000	3.936.000
94	Batam	Pekanbaru	8.707.000	4.599.000
95	Batam	Pontianak	7.594.000	4.396.000
96	Batam	Semarang	7.145.000	3.861.000
97	Batam	Solo	7.145.000	4.000.000
98	Batam	Surabaya	8.600.000	4.300.000
99	Batam	Timika	16.119.000	8.621.000
100	Bengkulu	Palembang	2.899.000	1.893.000
101	Biak	Balikpapan	18.622.000	9.477.000
102	Biak	Banda Aceh	18.718.000	10.108.000
103	Biak	Batam	16.333.000	8.664.000
104	Biak	Denpasar	16.729.000	8.995.000
105	Biak	Jayapura	3.615.000	2.321.000
106	Biak	Jogyakarta	15.648.000	8.108.000
107	Biak	Manado	11.734.000	6.353.000
108	Biak	Medan	18.472.000	9.498.000
109	Biak	Padang	16.932.000	8.728.000
110	Biak	Palembang	15.424.000	8.108.000
111	Biak	Pekanbaru	16.985.000	8.781.000
122	Biak	Pontianak	15.873.000	8.568.000
123	Biak	Surabaya	12.782.000	7.081.000
124	Biak	Timika	5.808.000	3.444.000
125	Bima	Surabaya	-	3.696.000
126	Denpasar	Jayapura	11.680.000	6.845.000
127	Denpasar	Kupang	5.091.000	2.952.000
128	Denpasar	Makassar	4.182.000	2.631.000
129	Denpasar	Malang	-	2.296.000
130	Denpasar	Manado	7.851.000	4.278.000
131	Denpasar	Mataram	1.840.000	1.390.000
132	Denpasar	Medan	10.589.000	5.658.000
133	Denpasar	Padang	9.049.000	4.888.000
134	Denpasar	Palangkaraya	8.557.000	4.909.000
135	Denpasar	Palembang	7.541.000	4.278.000
136	Denpasar	Pekanbaru	9.092.000	4.942.000
137	Denpasar	Pontianak	7.990.000	4.738.000
138	Denpasar	Surabaya	-	2.022.000
139	Denpasar	Timika	10.140.000	6.129.000
140	Jakarta	Ambon	13.285.000	7.081.000
141	Jakarta	Balikpapan	7.412.000	3.797.000
142	Jakarta	Banda Aceh	7.519.000	4.492.000
143	Jakarta	Bandarlampung	2.407.000	1.583.000
144	Jakarta	Banjarmasin	2.252.000	2.995.000
145	Jakarta	Batam	4.867.000	2.888.000
146	Jakarta	Bengkulu	4.364.000	2.621.000
147	Jakarta	Biak	14.065.000	7.519.000
148	Jakarta	Denpasar	5.305.000	3.262.000
149	Jakarta	Gorontalo	7.231.000	4.824.000
150	Jakarta	Jambi	4.065.000	2.460.000
151	Jakarta	Jayapura	14.568.000	8.193.000
152	Jakarta	Jogyakarta	4.107.000	2.268.000
153	Jakarta	Kendari	7.658.000	4.182.000
154	Jakarta	Kupang	9.413.000	5.081.000
155	Jakarta	Makassar	7.444.000	3.829.000
156	Jakarta	Malang	4.599.000	3.796.000

157	Jakarta (halim)	Malang	-	3.730.000
158	Jakarta	Mamuju	7.295.000	4.867.000
159	Jakarta	Manado	10.824.000	5.102.000
160	Jakarta	Manokwari	16.226.000	10.824.000
161	Jakarta	Mataram	5.316.000	3.230.000
162	Jakarta	Medan	7.252.000	3.808.000
163	Jakarta	Padang	5.530.000	2.952.000
164	Jakarta	Palangkaraya	4.984.000	2.984.000
165	Jakarta	Palembang	3.861.000	2.268.000
166	Jakarta	Palu	9.348.000	5.113.000
167	Jakarta	Pangkalpinang	3.412.000	2.139.000
168	Jakarta	Pekanbaru	5.583.000	3.016.000
169	Jakarta	Pontianak	4.353.000	2.781.000
170	Jakarta	Semarang	3.861.000	2.182.000
171	Jakarta	Solo	3.861.000	2.342.000
172	Jakarta	Surabaya	5.466.000	3.714.000
173	Jakarta (Halim)	Surabaya	-	3.696.000
174	Jakarta	Ternate	10.001.000	6.664.000
175	Jakarta	Timika	13.830.000	7.487.000
176	Jambi	Balikpapan	7.733.000	4.407.000
177	Jambi	Banjarmasin	7.690.000	4.193.000
178	Jambi	Denpasar	7.733.000	4.439.000
179	Jambi	Jogyakarta	6.653.000	3.551.000
180	Jambi	Kupang	11.434.000	6.075.000
181	Jambi	Makassar	9.659.000	4.952.000
182	Jambi	Malang	7.091.000	3.925.000
183	Jambi	Manado	12.707.000	6.097.000
184	Jambi	Palangkaraya	7.444.000	4.193.000
185	Jambi	Pontianak	6.878.000	4.011.000
186	Jambi	Semarang	6.428.000	3.476.000
187	Jambi	Solo	6.428.000	3.615.000
188	Jambi	Surabaya	7.883.000	3.915.000
189	Jayapura	Jogyakarta	13.274.000	7.690.000
190	Jayapura	Manado	22.109.000	11.263.000
191	Jayapura	Medan	18.932.000	10.097.000
192	Jayapura	Padang	17.381.000	9.327.000
193	Jayapura	Palembang	15.873.000	8.717.000
194	Jayapura	Pekanbaru	17.435.000	9.380.000
195	Jayapura	Pontianak	16.322.000	9.177.000
196	Jayapura	Timika	3.615.000	2.289.000
197	Jember	Surabaya	-	1.204.000
198	Jogyakarta	Denpasar	3.861.000	2.481.000
199	Jogyakarta	Makassar	6.525.000	3.893.000
200	Jogyakarta	Manado	10.536.000	5.722.000
201	Jogyakarta	Medan	9.519.000	4.770.000
202	Jogyakarta	Padang	7.969.000	4.000.000
203	Jogyakarta	Palembang	6.460.000	3.380.000
204	Jogyakarta	Pekanbaru	8.022.000	4.054.000
205	Jogyakarta	Pontianak	6.910.000	3.840.000
206	Jogyakarta	Timika	11.894.000	7.038.000
207	Kendari	Banda Aceh	12.953.000	7.102.000
208	Kendari	Batam	10.568.000	5.658.000
209	Kendari	Denpasar	5.455.000	3.273.000
210	Kendari	Jogyakarta	8.129.000	4.706.000
211	Kendari	Padang	11.167.000	5.722.000

212	Kendari	Palembang	9.659.000	5.102.000
213	Kendari	Pekanbaru	11.220.000	5.776.000
214	Kendari	Semarang	9.659.000	5.027.000
215	Kendari	Solo	9.659.000	5.166.000
216	Kendari	Surabaya	11.103.000	5.466.000
217	Kendari	Timika	18.633.000	9.798.000
218	Kotabaru	Surabaya	-	3.526.000
219	Kupang	Jayapura	14.386.000	8.108.000
220	Kupang	Jogyakarta	7.348.000	4.182.000
221	Kupang	Makassar	7.637.000	4.311.000
222	Kupang	Manado	11.648.000	6.140.000
223	Kupang	Surabaya	6.749.000	3.722.000
224	Makasar	Biak	8.493.000	4.931.000
225	Makasar	Jayapura	10.193.000	5.787.000
226	Makasar	Kendari	2.663.000	1.786.000
227	Makasar	Surabaya	-	4.620.000
228	Makasar	Manado	5.327.000	2.909.000
229	Makasar	Timika	11.723.000	6.567.000
230	Malang	Balikpapan	10.108.000	5.134.000
231	Malang	Banda Aceh	10.204.000	5.765.000
232	Malang	Banjarmasin	8.161.000	4.407.000
233	Malang	Batam	7.819.000	4.311.000
234	Malang	Biak	16.087.000	8.482.000
235	Malang	Jayapura	16.536.000	9.092.000
236	Malang	Kendari	10.322.000	5.487.000
237	Malang	Makassar	10.129.000	5.166.000
238	Malang	Manado	13.167.000	6.311.000
239	Malang	Medan	9.958.000	5.145.000
240	Malang	Padang	8.418.000	4.385.000
241	Malang	Palangkaraya	7.915.000	4.407.000
242	Malang	Palembang	6.899.000	3.765.000
243	Malang	Pekanbaru	8.461.000	4.439.000
244	Malang	Timika	15.873.000	8.461.000
245	Manado	Medan	15.552.000	7.316.000
246	Manado	Padang	14.012.000	6.546.000
247	Manado	Palembang	12.504.000	5.926.000
248	Manado	Pekanbaru	14.055.000	6.599.000
249	Manado	Pontianak	12.953.000	6.396.000
250	Manado	Semarang	12.504.000	5.851.000
251	Manado	Solo	12.504.000	5.990.000
252	Manado	Surabaya	9.937.000	5.262.000
253	Manado	Timika	16.183.000	8.995.000
254	Lombok Praya	Balikpapan	10.750.000	5.615.000
255	Lombok Praya	Banda Aceh	10.846.000	6.246.000
256	Lombok Praya	Banjarmasin	8.803.000	4.888.000
257	Lombok Praya	Batam	8.461.000	4.803.000
258	Lombok Praya	Biak	11.552.000	6.546.000
259	Lombok Praya	Jayapura	13.092.000	7.327.000
260	Lombok Praya	Jogyakarta	4.417.000	2.781.000
261	Lombok Praya	Makassar	4.717.000	2.909.000
262	Lombok Praya	Manado	8.717.000	4.738.000
263	Lombok Praya	Medan	10.600.000	5.637.000
264	Lombok Praya	Padang	9.060.000	4.867.000
265	Lombok Praya	Palembang	7.551.000	4.246.000
266	Lombok Praya	Pekanbaru	9.102.000	4.909.000

267	Lombok Praya	Pontianak	8.001.000	4.706.000
268	Lombok Praya	Surabaya	3.829.000	2.584.000
269	Medan	Banda Aceh	3.466.000	2.193.000
270	Medan	Makassar	12.514.000	6.172.000
271	Medan	Pontianak	9.733.000	5.230.000
272	Medan	Semarang	9.284.000	4.696.000
273	Medan	Solo	9.284.000	4.835.000
274	Medan	Surabaya	10.739.000	5.134.000
275	Medan	Timika	18.258.000	9.455.000
276	Padang	Makassar	10.974.000	5.402.000
277	Padang	Pontianak	8.193.000	4.460.000
278	Padang	Semarang	7.744.000	3.925.000
279	Padang	Solo	7.744.000	4.065.000
280	Padang	Surabaya	9.199.000	4.364.000
281	Padang	Timika	16.718.000	8.685.000
282	Palangkaraya	Banda Aceh	10.546.000	6.022.000
283	Palangkaraya	Batam	8.161.000	4.578.000
284	Palangkaraya	Jogyakarta	7.477.000	4.022.000
285	Palangkaraya	Mataram	8.557.000	4.888.000
286	Palangkaraya	Medan	10.300.000	5.412.000
287	Palangkaraya	Padang	8.760.000	4.642.000
288	Palangkaraya	Palembang	7.252.000	4.022.000
289	Palangkaraya	Pekanbaru	8.803.000	4.696.000
290	Palangkaraya	Semarang	7.252.000	3.947.000
291	Palangkaraya	Solo	7.252.000	4.086.000
292	Palangkaraya	Surabaya	8.696.000	4.385.000
293	Palembang	Balikpapan	9.894.000	5.220.000
294	Palembang	Makassar	9.466.000	4.781.000
295	Palembang	Pontianak	6.685.000	3.840.000
296	Palembang	Semarang	6.236.000	3.305.000
297	Palembang	Solo	6.236.000	3.444.000
298	Palembang	Surabaya	7.690.000	5.712.000
299	Palembang	Timika	15.210.000	8.076.000
300	Palu	Makassar	4.268.000	2.578.000
301	Palu	Poso	1.957.000	1.423.000
302	Palu	Sorong	6.878.000	3.883.000
303	Palu	Surabaya	6.878.000	3.883.000
304	Palu	Toli-Toli	2.941.000	1.915.000
305	Pangkal Pinang	Balikpapan	9.038.000	4.631.000
306	Pangkal Pinang	Banjarmasin	7.091.000	3.915.000
307	Pangkal Pinang	Batam	6.739.000	3.818.000
308	Pangkal Pinang	Jogyakarta	6.065.000	3.262.000
309	Pangkal Pinang	Makassar	9.060.000	4.663.000
310	Pangkal Pinang	Manado	12.097.000	5.808.000
311	Pangkal Pinang	Medan	8.888.000	4.653.000
312	Pangkal Pinang	Padang	7.337.000	3.883.000
313	Pangkal Pinang	Palembang	5.829.000	3.262.000
314	Pangkal Pinang	Pekanbaru	7.391.000	3.936.000
315	Pangkal Pinang	Pontianak	6.279.000	3.733.000
316	Pangkal Pinang	Semarang	5.829.000	3.187.000
317	Pangkal Pinang	Solo	5.829.000	3.326.000
318	Pangkal Pinang	Surabaya	7.284.000	5.228.000
319	Pangkalan Bun	Surabaya	-	3.480.000
320	Pekanbaru	Pontianak	8.247.000	4.514.000
321	Pekanbaru	Semarang	7.797.000	3.979.000

322	Pekanbaru	Solo	7.797.000	4.118.000
323	Pekanbaru	Surabaya	9.241.000	4.407.000
324	Pekanbaru	Timika	16.771.000	8.739.000
325	Pontianak	Makassar	9.915.000	5.241.000
326	Pontianak	Semarang	6.685.000	3.765.000
327	Pontianak	Solo	6.685.000	3.904.000
328	Pontianak	Surabaya	8.140.000	5.694.000
329	Pontianak	Timika	15.659.000	8.535.000
330	Samarinda	Surabaya	-	5.054.000
331	Semarang	Makassar	9.466.000	4.706.000
332	Solo	Makassar	9.466.000	4.845.000
333	Surabaya	Denpasar	3.198.000	1.979.000
334	Surabaya	Jayapura	12.675.000	7.231.000
335	Surabaya	Yogyakarta	-	2.510.000
336	Surabaya	Makassar	5.936.000	4.620.000
337	Surabaya	Solo	-	1.810.000
338	Surabaya	Tanjungpandan	-	4.230.000
339	Surabaya	Tanjungkarang	-	4.870.000
340	Surabaya	Semarang	-	2.070.000
341	Surabaya	Waingapu	-	4.816.000
342	Surabaya	Timika	11.295.000	6.589.000

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH, M.Hum
Pembina Tk. I
NIP. 19650302 199003 1 019

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA MALANG
 NOMOR : 38 TAHUN 2018
 TENTANG :
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 WALIKOTA MALANG NOMOR 23
 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR BIAYA
 UMUM TAHUN ANGGARAN 2019.

STANDAR HONORARIUM

H. HONORARIUM PELAKSANA KEGIATAN

Yang diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
1	2	3	4
1.	Tim Pelaksana Kegiatan yang Susunan Keanggotaannya belum tertuang dalam peraturan perundang-undangan namun diamanatkan untuk dibentuk: 1. Tim Pengarah a. Ketua (Walikota) b. Wakil Ketua (Wakil Walikota) c. Sekretaris (Sekretaris Daerah) d. Anggota : 1) Asisten yang membidangi 2) Staf Ahli yang membidangi 3) Dst 2. Tim Pelaksana a. Koordinator / Ketua b. Wakil Ketua c. Sekretaris d. Anggota c. Sekretariat Tim Pelaksana 1) Ketua/Wakil Ketua 2) Sekretaris 3) Anggota Keterangan: Susunan Keanggotaan Tim disesuaikan dengan kebutuhan yang diamanatkan	 Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	 3.000.000,00 2.750.000,00 2.500.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.000.000,00 1.750.000,00 1.500.000,00 1.250.000,00 400.000,00 350.000,00 300.000,00
2.	Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) a. Pelindung I b. Pelindung II c. Ketua d. Wakil Ketua e. Sekretaris f. Anggota g. Staf Pelaksana	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	12.500.000,00 11.000.000,00 10.000.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 5.000.000,00 3.500.000,00
3.	Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah a. Penanggung jawab : Walikota b. Ketua : Sekretaris Daerah c. Wakil Ketua : Kepala Badan yang menyelenggarakan perencanaan daerah d. Sekretaris : Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan penataan ruang daerah e. Anggota : Perangkat Daerah yang terkait penataan ruang yang menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	1.750.000,00 1.500.000,00 1.250.000,00 1.000.000,00 750.000,00

4.	Tim Reformasi Birokrasi a. Tim Pengarah a. Ketua b. Wakil Ketua c. Sekretaris d. Anggota b. Tim Pelaksana a. Ketua b. Sekretaris c. Wakil Sekretaris d. Kelompok Kerja a) Ketua b) Anggota e. Agen Perubahan	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	3.000.000,00 2.500.000,00 2.000.000,00 1.750.000,00 - 1.750.000,00 1.500.000,00 1.250.000,00 1.000.000,00 500.000,00
5.	Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan Liar 1. Penanggungjawab 2. Wakil Penanggungjawab I Wakil Penanggungjawab II Wakil Penanggungjawab III 3. Ketua Pelaksana 4. Wakil Ketua I Wakil Ketua II 5. Sekretaris I Sekretaris II 6. Anggota 7. Kelompok Ahli 8. Kelompok Kerja a. Ketua b. Sekretaris c. Anggota	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	3.000.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 2.200.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.200.000,00 2.500.000,00 1.000.000,00 900.000,00 800.000,00
6.	Tim Asisten Pembahasan Ranperda di DPRD 1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Sekretaris 4. Anggota	Orang/ kedatangan Orang/ kedatangan Orang/ kedatangan Orang/ kedatangan	800.000,00 700.000,00 600.000,00 500.000,00
7.	Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Anggota	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	1.500.000,00 1.300.000,00 1.200.000,00
8.	Tim Penyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 1. Tim Pengarah a. Walikota b. Wakil Walikota 2. Penanggung Jawab (Sekretaris Daerah) 3. Ketua b. Wakil Ketua c. Sekretaris d. Kelompok Kerja 1) Ketua 2) Anggota	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	3.000.000,00 2.500.000,00 2.250.000,00 2.000.000,00 1.750.000,00 1.650.000,00 1.500.000,00 1.250.000,00
	Susunan Kelompok Kerja Tim disesuaikan dengan kebutuhan yang diketuai oleh Kepala Bidang/Bagian dengan anggota pejabat/staf Perangkat Daerah dan unsur Pemerintahan/Non Pemerintahan yang dinilai kompeten sebagai Tenaga Ahli		

10.	<p>Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah</p> <p>a. Tim Pengarah</p> <p>1) Walikota</p> <p>2) Wakil Walikota</p> <p>b. Ketua (Kepala PD)</p> <p>c. Sekretaris</p> <p>d. Kelompok Kerja</p> <p>3) Ketua</p> <p>4) Anggota</p> <p>Susunan Kelompok Kerja Tim disesuaikan dengan kebutuhan yang diketuai oleh Kepala Bidang/Bagian dengan anggota pejabat/staf Perangkat Daerah dan unsur Pemerintahan/Non Pemerintahan yang dinilai kompeten sebagai Tenaga Ahli</p>	<p>Orang/Bulan</p> <p>Orang/Bulan</p>	<p>2.000.000,00</p> <p>1.500.000,00</p> <p>1.000.000,00</p> <p>750.000,00</p> <p>500.000,00</p> <p>450.000,00</p>
11	<p>Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah</p> <p>a. Tim Pengarah</p> <p>1. Walikota</p> <p>2. Wakil Walikota</p> <p>b. Ketua (Kepala PD)</p> <p>c. Sekretaris</p> <p>d. Kelompok Kerja</p> <p>1. Ketua</p> <p>2. Anggota</p> <p>Susunan Kelompok Kerja Tim disesuaikan dengan kebutuhan yang diketuai oleh Kepala Bidang/Bagian dengan anggota pejabat/staf Perangkat Daerah dan unsur Pemerintahan/Non Pemerintahan yang dinilai kompeten sebagai Tenaga Ahli</p>	<p>Orang/Bulan</p> <p>Orang/Bulan</p>	<p>2.000.000,00</p> <p>1.500.000,00</p> <p>1.000.000,00</p> <p>750.000,00</p> <p>500.000,00</p> <p>450.000,00</p>
12.	<p>Komite Ekonomi Kreatif</p> <p>a. Pembina</p> <p>1) Walikota</p> <p>2) Wakil Walikota</p> <p>3) Sekretaris Daerah</p> <p>b. Ketua</p> <p>c. Anggota</p> <p>d. Komisi Pelaksana</p> <p>1) Ketua</p> <p>2) Wakil Ketua</p> <p>3) Sekretaris</p> <p>4) Anggota</p>	<p>Orang/Bulan</p> <p>Orang/Bulan</p> <p>Orang/Bulan</p> <p>Orang/Bulan</p> <p>Orang/Bulan</p> <p>Orang/Bulan</p> <p>Orang/Bulan</p> <p>Orang/Bulan</p> <p>Orang/Bulan</p> <p>Orang/Bulan</p>	<p>2.500.000,00</p> <p>2.250.000,00</p> <p>2.000.000,00</p> <p>1.750.000,00</p> <p>1.500.000,00</p> <p>1.250.000,00</p> <p>1.150.000,00</p> <p>1.000.000,00</p> <p>850.000,00</p>
13.	<p>Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman</p> <p>a. Ketua : Sekretaris Daerah</p> <p>b. Wakil Ketua : Kepala Barenlitbang</p> <p>c. Sekretaris : Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman</p> <p>d. Anggota : Unsur Perangkat Daerah Teknis terkait, BPN, Camat dan Lurah</p>	<p>Orang/ Kegiatan</p> <p>Orang/ Kegiatan</p> <p>Orang/ Kegiatan</p> <p>Orang/ Kegiatan</p>	<p>2.000.000,00</p> <p>1.500.000,00</p> <p>1.250.000,00</p> <p>1.000.000,00</p>
14.	<p>Tim Badan Pertimbangan, Mutasi, Jabatan dan Pengangkatan ASN</p> <p>1. Ketua</p> <p>2. Sekretaris</p> <p>3. Anggota</p> <p>Sekretariat Badan Pertimbangan Mutasi Jabatan dan Pangkat Daerah</p> <p>1. Ketua</p> <p>2. Sekretaris</p>	<p>Orang/Bulan</p> <p>Orang/ Bulan</p> <p>Orang/ Bulan</p> <p>Orang/ Bulan</p> <p>Orang/ Bulan</p> <p>Orang/ Bulan</p>	<p>4.000.000,00</p> <p>3.000.000,00</p> <p>3.000.000,00</p> <p>1.500.000,00</p> <p>1.000.000,00</p>

	3. Anggota	Orang/ Bulan	750.000,00
15.	Tim Pengelola Website Pemerintah Kota Malang		
	1. Penanggung Jawab	Orang/Bulan	500.000,00
	2. Redaktur	Orang/Bulan	450.000,00
	3. Editor	Orang/Bulan	400.000,00
	4. Web Admin	Orang/Bulan	350.000,00
	5. Web Developer	Orang/Bulan	300.000,00
	6. Pembuat Artikel	Per halaman	100.000,00
	7. Penerjemah	Per 1.500 karakter	100.000,00
16.	Tim Penyusun Jurnal/Buletin/Majalah		
	1. Pengarah	Orang/Terbit	2.000.000,00
	2. Penanggung Jawab	Orang/Terbit	1.500.000,00
	3. Pimpinan Umum	Orang/Terbit	600.000,00
	4. Pimpinan Redaksi	Orang/Terbit	400.000,00
	5. Redaktur	Orang/Terbit	350.000,00
	6. Penyunting/Editor	Orang/Terbit	250.000,00
	7. Desain Grafis & Fotografer	Orang/Terbit	180.000,00
	8. Sekretariat	Orang/Terbit	150.000,00
	9. Pembuat Artikel	Halaman	100.000,00
17	Tim Inventarisasi Kepemilikan Tanah Aset Pemerintah		
	a. Tim Pengarah		
	1) Ketua	Orang/Bulan	5.000.000,00
	2) Wakil Ketua	Orang/Bulan	4.000.000,00
	3) Sekretaris	Orang/Bulan	3.500.000,00
	4) Anggota	Orang/Bulan	3.000.000,00
	b. Tim Pelaksana		
	1) Ketua	Orang/Bulan	1.500.000,00
	2) Sekretaris	Orang/Bulan	1.250.000,00
	3) Anggota	Orang/Bulan	1.000.000,00

I. HONORARIUM LAIN-LAIN

7. HONORARIUM INSTRUKTUR/PELATIH

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
1	2	3	4
1.	Pelatihan Pengamanan Wilayah (Panwil)		
	1. Instruktur/Pelatih (PNS)	Orang/Hari	350.000,00
	2. Instruktur/Pelatih (Non PNS)	Orang/Hari	400.000,00
2.	Pelatihan SAR (Search and Rescue)		
	1. Instruktur/Pelatih (PNS)	Orang/Hari	450.000,00
	2. Instruktur/Pelatih (Non PNS)	Orang/Hari	500.000,00
3.	Pelatihan Kewirausahaan/Ketrampilan		
	1. Instruktur/Pelatih (PNS)	Orang/Hari	125.000,00
	2. Instruktur/Pelatih (Non PNS)	Orang/Hari	175.000,00
4.	Pelatihan Senam Kesegaran Jasmani		
	1. Instruktur/Pelatih (PNS)	Orang/Jam	100.000,00
	2. Instruktur/Pelatih (Non PNS)	Orang/Jam	150.000,00
5.	Pelatihan Keolahragaan		
	1) Instruktur/Pelatih (PNS)	Orang/Jam	100.000,00
	2) Instruktur/Pelatih (Non PNS)	Orang/Jam	110.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

TABRANI, SH, M.Hum
Pembina Tk. I